

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM  
MEWUJUDKAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MOOTILANGO  
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh  
**BUDI HARDIYANTO**  
**NIM. S.21.15.033**

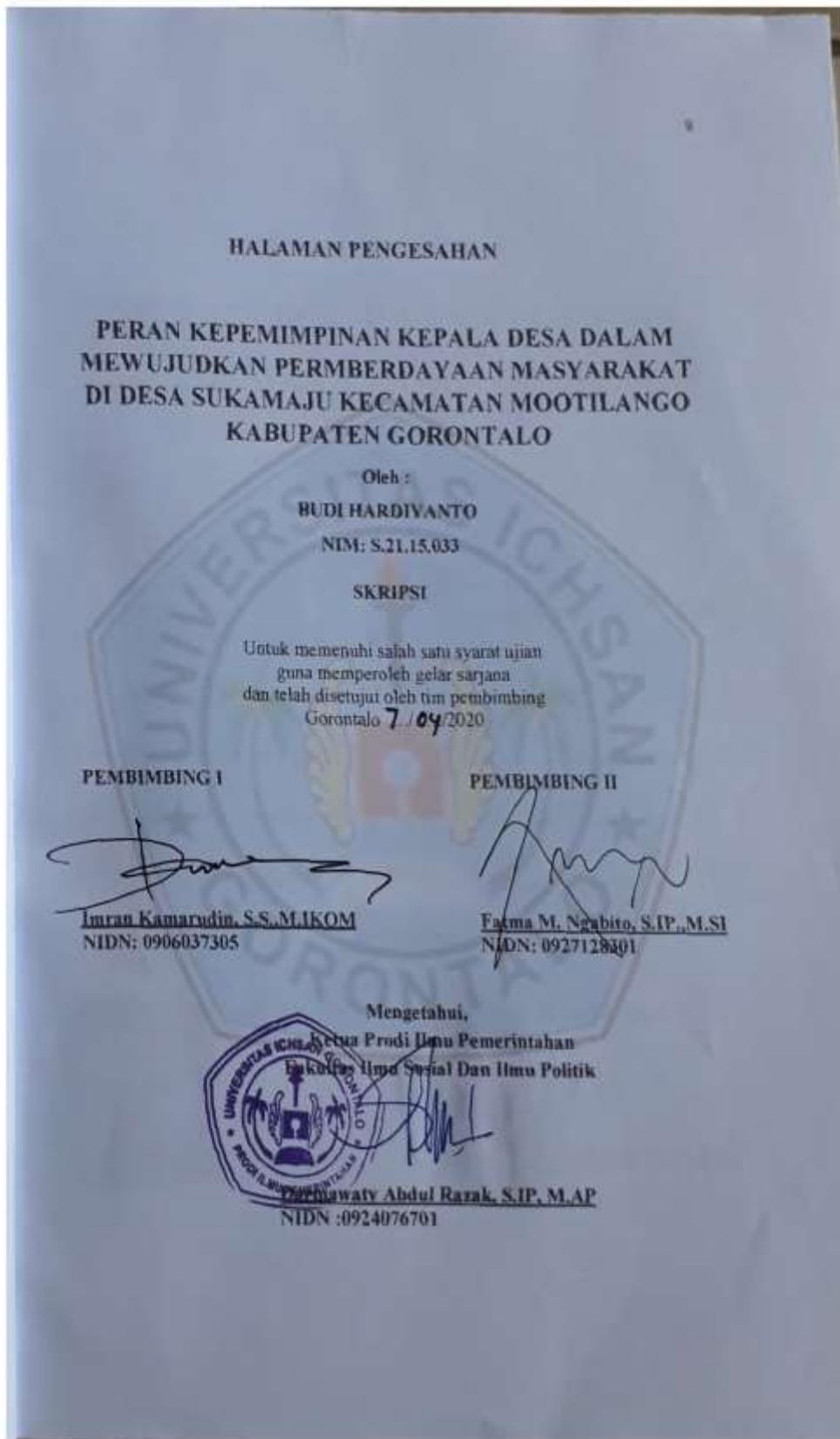
**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2020**





## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA	BUDI HARDIYANTO
NIM	S2115033
Konsentrasi	MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
Program Studi	ILMU PEMERINTAHAN

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Kalau tidak bisa melewati pintu depan, maka lewati pintu samping. kalaupun tidak bisa juga, maka lewati pintu belakang. jika tidak bisa, menerobos adalah solusi terakhir.”*

*-penulis*

### PERSEMBAHAN :

- Ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti bahwa saya telah menyelesaikan skripsi ini kepada Ibunda (Hj. Kartin Ahmad) dan Ayahanda (Hj. Hartoyo) tercinta. Terimakasih atas segala cinta dan kasihya yang telah menyekolahkan ku dari bangku TK hingga menjadi seorang Sarjana.
- Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya “*KAPAN SKRIPSIMU SELESAI?*”
- Untuk perempuan yang seharusnya kutulis di lembar ini, berbahagialah selalu, jangan hilang senyummu meski yang kau pilih tak seperti aku.
- Almamater tercinta tempat ku belajar dan menimba ilmu Universitas Ichsan Gorontalo.

## ABSTRAK

**Budi Hardiyanto.** Nim S2115033, 2020. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat.". Skripsi. (pembimbing I Imran Kamaruddin, S.S.,M.I KOM dan pembimbing II Fatma M. Ngabito, S.I.P.,M.Si). jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, sesuai dengan kebutuhan penulis.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kepala desa Sukamaju telah melaksanakan perannya dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui program Pembinaan Generasi Muda, Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita dan Kelompok Tani Ternak. Namun belum begitu maksimal, seperti program pembinaan generasi muda ada juga sebagian pemuda masih apatis dalam mengikuti proses pembinaan generasi muda dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa. Begitu juga dalam program perbaikan gizi ibu hamil dan balita para aparatur desa dan kader posyandu sudah memberikan sosialisasi dan himbauan untuk datang keposyandu tapi masih ada saja warga yang kurang peduli akan pentingnya memeriksakan ibu hamil dan balita di posyandu. Dalam program kelompok tani ternak, kepala desa akan memberikan sanksi berupa di keluarkan dari program desa bagi warga yang menjual sapi bantuan tersebut. Dari hasil temuan peneliti, kurangnya partisipasi masyarakat, pengaruh dari orang luar, dan penyediaan sarana prasarana yang menjadi faktor penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sukamaju kecamatan mootilango kabupaten gorontalo.

**Kata Kunci :** Peran Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

## ABSTRACT

**Budi Hardianto.** Nim S2115033,2020. “The Role Of Village Head Leadership in Realizing Community Empowerment.” Essay. (advisor 1 Imran Kamaruddin, S.S.,M.I KOM and supervisor II Fatma M. Ngabito, S.IP.,M.Si). Department of Governmental science, Faculty of Social and Political sciences, Ichsan Gorontalo University. This research was conducted to determine how the village head leadership role in realizing community empowerment in Sukamaju Village, Mootilango District, Gorontalo district and what factors are the obstacles to the village head leadership role in realizing community empowerment in Sukamaju Village, Mootilango District, Gorontalo District.

This research was conducted using qualitative descriptive methods, data collection using observation and interview methods. So that the data obtained is completely accurate, according to the author's needs.

The results showed that the head of the sukamaju village had carried out its role in an effort to empower village communities through the youth generation development program, nutrition improvement for pregnant women and toddlers and animal farmer groups. However, this is not yet optimal, such as the youth development program, some youth are still apathetic in following the youth development process and are reluctant to participate in activities in the village. Likewise, in the nutrition improvement program for pregnant women and toddlers, village officials and posyandu cadres have provided socialization and appealed to the posyandu but there are still residents who do not care about the importance of checking pregnant women and toddlers at posyandu. In the livestock farmer group program, the village head will impose a sanction in the form of being removed from the village program for resident who sell the aid cows. From the findings of the researchers, the lack of community participation, influence from outsiders, and the provision of infrastructure are factors inhibiting the leadership role of the village head in community empowerment in the sukamaju village, Mootilango sub-district, Gorontalo district.

**Keyword:** Role of Village Head, Community Empowerment.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
- Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
- Bapak Imran Kamarudin, S.S.,M.IKOM selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Ibu Fatma M. Ngabito, S.IP.,M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

- Bapak Halid M. Salehe, selaku Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang telah membantu penulis selama pengambilan data dilapangan.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Agustus 2020

**Budi Hardiyanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Konsep Kepemimpinan .....	12
2.1.1. Pengertian Kepemimpinan .....	12
2.1.2. Peran Kepemimpinan .....	17
2.2 Konsep Pemerintah Desa.....	21
2.2.1. Pengertian Pemerintah desa.....	21
2.2.2. Kepala Desa.....	22
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.3.2 Kerangka Berfikir.....	30

### **BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1 Obyek Penelitian .....	33
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Informan .....	34
3.5 Jenis Data .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan data .....	35

3.7	Teknik Analisis Data .....	36
3.8	Keabsahan Data .....	38

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.1.1	Batas Wilayah.....	39
4.1.2	Jumlah Penduduk.....	39
4.1.3	Visi Misi.....	39
4.1.4	Tugas Pokok.....	41
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian .....	50
4.2.1	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango KabupatenGorontalo.....	50
4.2.2	Pembinaan generasi Muda .....	51
4.2.3	Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita.....	55
4.2.4	Kelompok Tani Ternak .....	60
4.2.5	Faktor Penghambat dari Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat .....	63
4.3	Pembahasan .....	66
4.3.1.	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.....	66
4.3.2	Pembinaan generasi Muda .....	67
4.3.3	Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita.....	68
4.3.4	Kelompok Tani Ternak .....	70
4.3.5	Faktor Penghambat dari Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.....	71

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan .....	74
5.2.	Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	32
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data : Model Interaktif.....	37

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 pedoman wawancara .....	79
Lampiran 2 dokumentasi bersama kepala desa, aparat desa dan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamantan Mootilango.....	81
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian .....	83
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	85
Lampiran 5 Hasil Uji Turnitin .....	86
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....	87

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di indonesia sejak digulirkan telah membawa konsekuensi logis terhadap pelaksanaan pemerintahan, baik pada tingkat pemerintah pusat, maupun pemerintahan ditingkat bawah, yaitu pemerintah daerah. Salah satu konsekuensi yang merupakan hasil penerapan otonomi daerah adalah adanya konteks pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam hal pembangunan sudah menerapkan atas keterlibatan publik, dengan pertimbangan utamanya adalah suara dari pemerintahan terkecil, yaitu tingkat desa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenram, tertib dan dinamis, maka pada pola ketahanan nasional dimasa depan, perlu dikembangkan secara maksimal.

Sebagaimana kita ketahui, jumlah penduduk indonesia lebih besar bertempat tinggal di pedesaan yang hidup dari mata pencaharian pertanian, mempunyai kekerabatan yang kuat berpegang teguh pada hukum adat dan mempunyai kekerabatan yang kuat berpegang teguh pada hukum adat dan mempunyai semangat gotong royong yang tinggi. Sehingga tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan

terendah dalam struktur pemerintahan indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ihktiar dalam pembangunan nasional menyeluruh.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu diwujudkan ialah pelaksanaan peranan kepemimpinan kepala desa dan peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, di samping memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistik dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan

daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah selalu bermuara ke desa.

Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih di dasarkan atau ditentukan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pembangunan ditingkat desa bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan dan partisipasi masyarakat itu sendiri sebagai wujud pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan lebih terarah, apabila ada motivasi dari kepala desa, tingkat pendidikan masyarakat mendukung, kesejahteraan masyarakat terpenuhi serta sosial budaya mendukung. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa maka,

kegiatan pembangunan berjalan sesuai yang di harapkan atau yang direncanakan sebelumnya.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan di manfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang di lakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak di perlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses mau pun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Seorang kepala desa, selaku pimpinan tertinggi di desanya, tentu sangat diharapkan perannya dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran kepala desa

penting dalam memberikan dorongan kepada masyarakat, memberikan informasi yang beruhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak di bicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk di libatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat di pecahkan.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia. Dimensi

kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materil hingga non materil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidunya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka.

Pendekatan top-down tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang di butuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektivan kegiatan yang dilakukan.

Pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui program pembangunan desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong atau swadaya murni, yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri

sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa. Dalam pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa.

Pada kenyataannya masyarakat itu perlu di dorong untuk lebih mengembangkan potensi dirinya masing-masing, kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain memimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada didesa. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 (1) PP Nomor 72 tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Kurangnya peran pemerintah terutama pemerintah desa sukamaju kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dalam hal pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang menjadi hasil temuan awal pada prapenelitian yang dilakukan oleh penulis, terlihat tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat desa tersebut

akibat tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, mayoritas tingkat Pendidikan masih relative rendah, begitu juga dengan pengetahuan tentang kesehatan masih relative sedikit merupakan kondisi yang terjadi di desa sukamaju. sikap pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pembangunan desa akan mematikan tradisi gotong royong masyarakat desa dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam pembangunan tersebut akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut, selain itu ditemukan juga bahwa masyarakat desa sukamaju masih banyak yang tidak mengetahui program pembangunan desa yang sedang dilaksanakan, yang menyebabkan mereka juga tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan desa tersebut.

Faktor kurangnya komunikasi antara pemerintah desa, khususnya kepala desa bersama unsur BPD juga masih menjadi salah satu hal juga sebagai latar permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa suka maju. Pemberdayaan yang ada selama ini hanya di pandang pada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi saja oleh pemerintah desa, namun hal terabaikan adalah upaya pemberdayaan dalam konteks tersediaannya fasilitas atau berupa sarana pendukung dari kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat, serta sebagai bentuk kelancaran dari aktifitas sehari-hari masyarakat. Seperti pembangunan jalan desa pembangunan jalan tani dan pembangunan fisik lainnya.

Permasalahan di atas terjadi dikarenakan masih kurangnya peran kepala desa sebagai pimpinan di desa dalam menemukan strategi yang cocok dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Keadaan tersebut di atas membuat

masyarakat bersikap tidak peduli lagi terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan sudah diambil alih oleh pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa sebagian dibiayai oleh dana pemerintah, namun pada hakikatnya tidaklah demikian dan sangat diharapkan swadaya masyarakat lebih besar dari bantuan yang diberikan, sehingga pemberdayaan masyarakat tampak lebih dominan. Kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seseorang kepala desa juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Untuk itu, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul "**Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo**".

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan memperhatikan fenomena empiris yang di jelaskan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang di ambil oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango?
2. Apa Saja faktor yang menjadi Penghambat Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan,sebagai berikut:

1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Kajian dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan, khususnya menyangkut peran kepemimpinan kepala desa

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Suka Maju Kecamatan Mootilango, di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang di hadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.

c. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah, sekaligus mendapat pengetahuan dan informasi mengenai arti penting tentang peran kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Kepemimpinan**

Berbagai literature atau teoritis telah menjelaskan banyak hal tentang apa sebetulnya defenisi dari kepemimpinan, salah satunya sebagaimana yang diungkapkan Krajewsky dalam Ridwan (2009:177) mengatakan bahwa kepemimpinan memiliki peran yang sangat strategis. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (*initiating structure*) dan bawahan (*consideration*) merupakan suatu proses dimana seorang pemimpin tidak hanya memperhatikan faktor-faktor kebutuhan pemenuhan tugas dan target yang telah ditentukan tetapi juga memperhatikan faktor moral dan manusiawi dari para anggotanya.

Kemudian Boone dan Kurtz dalam Nawawi (2008:25) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan mencapai tujuan spesifik. Untuk itu seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku anggota organisasinya. Dengan kata lain berdasarkan hasil identifikasi terhadap perilaku anggota organisasi, seorang pemimpin dapat merancang dan melaksanakan pemberian motivasi yang tepat dalam usaha mempengaruhi agar anggota organisasi melaksanakan kegiatan/pekerjaannya. Berikut akan dijelaskan apa saja pengertian dari kepemimpinan berdasarkan pendapat dari teoritis.

##### **2.1.1 Pengertian Kepemimpinan**

Kepala desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dan mendapat

dukungan suara terbanyak memakai pemimpin formal ditingkat desa. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan keberadaannya. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin mesti ada aktivitasnya, usaha dan karya yang disebut dengan kepemimpinan.

Rivai (2008:2) mengatakan bahwa kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk mempebaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi pegawai agar ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, peran kepemimpinan dalam mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi bawahannya sangat di harapkan untuk memaksimalkan potensi mereka secara penuh.

Selanjutnya Davis dalam Thoha (2008:287) meremuskan esmpat sifat umum yang nampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yakni:

1. Kecerdasan. Hasil pada penelitian pada umumnya membuktikan bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat

menarik dari penelitian tersebut ialah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.

2. Kedewasaan dan kekuasaan hubungan sosial. Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. Dia mempunyai keinginan menghargai dan di hargai.
3. Memotivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari yang ekstrinsik.
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau menghargai diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. Dalam istilah penelitian Universitas Ohio, pemimpin itu mempunyai perhatian, dan kalau mengikuti istilah Michigan, pemimpin itu berorientasi pada pegawai bukan orientasi pada produksi.

Reuter dalam Sutarto (2006:12) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang-orang tanpa memakai wibawa atau kekuatan formal jabatan atau keadaan luar. Selanjutnya kepemimpinan menurut Terry (2007:161) adalah suatu himpunan bagian dari tindakan. Namun tidak semua tindakan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tindakan yang autentik, suatu metode yang unik dan terhormat dari keterlibatan dalam kehidupan.

Barnard dalam Siswanto(2008:154) berpendapat bahwa kepemimpinan memiliki dua aspek. *Pertama*, adalah kelebihan individual teknik kepemimpinan. Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik, memiliki keterampilan yang tinggi, menguasai teknologi, memiliki persepsi yang tepat, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ingatan yang baik, serta imajinasi yang meyakinkan mampu memimpin bawahan. *Kedua*, adalah keunggulan pribadi dalam hal ketegasan, keuletan, kesadaran, dan keberhasilan.

Freeman dan Tailor dalam Sutarto (2006:13) mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu. Adapun kepemimpinan menurut kartono (2008:6) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi international). Kepemimpinan ini bisa berperan atas dasar menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Kartono (2008:63) kategori teknik kepemimpinan adalah:

1. Etika profesi pemimpin;
2. Kebutuhan dan motivasi;
3. Dinamika kelompok komunikasi;
4. Komunikasi;
5. Kemampuan pengambilan keputusan;

## 6. Keterampilan berdiskusi.

Dari pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu. Pemimpin sebagai suatu kepribadian memiliki motivasi yang tidak sama dengan motivasi anggota kelompoknya, baik dalam mewujudkan kehendak untuk bergabung dan bersatu dalam satu kelompok, maupun dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mencakup pembangunan segala bidang, baik itu fisik maupun mental spiritual dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Usaha yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa, dituntut adanya keterlibatan masyarakat baik itu fisik maupun mental terhadap program pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah dengan informasi melalui kepala desa.

Usaha yang di lakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa dituntut adanya peran aktif pemimpin formal untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat sehingga adanya tanggapan masyarakat maka timbul keterlibatan fisik maupun mental terhadap program pelaksana pembangunan dilaksanakan pemerintah.

Dari pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan ialah suatu proses mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi

perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompoknya.

### **2.1.2 Peran Kepemimpinan**

Stoner dalam Pasolong (2008:22) mengatakan bahwa peran dari kepemimpinan birokrasi adalah agar seseorang beroperasi secara efektif, kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal peranan utama,yaitu:

1. Berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah
2. Memelihara kelompok sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu merasa di hargai oleh kelompok.

Bennis dalam Mustopadidjaja dan Sugianto (2006:16), mengemukakan bahwa peran kepemimpinan adalah menggerakkan usaha bersama organisasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang penting (*empowering the collective effort of the organization toward meaningful goals*) yang indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut :

- Anggota merasa sebagai bagian terpenting (*people feel important*)
- Pengetahuan dan kecakapan anggota meningkat (*learning and competence are reinforced*)
- Pekerjaan di pandang sebagai sesuatu yang mengasyikkan, menimbulkan kegairahan, dan menyenangkan (*working is viewed as exciting stimulating, and enjoyable*).

Kemudian Kartono (2008:93) mengatakan bahwa peran kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efesien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu perencanaan.

Dari pendapat ahli diatas dapat di simpulkan bahwa peran kepemimpinan adalah menggerakkan usaha bersama organisasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan usaha mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi orang, agar pikiran dan kegiatannya tidak menyimpang dari tugas pokok unit/bidangnya masing-masing.

Menurut Siagian (2007:21), seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuan untuk antara lain:

1. Pemegang kemudi organisasi yang cekatan dengan jalan membawa organisasi ke tempat tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya tanpa melalui terlambau banyak penyimpangan yang jika terjadi dengan frekwensi yang tinggi akan mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi;
2. Berperan selaku katalisator yang mampu meningkatkan laju jalannya roda organisasi yang di harapkan terjadi atas dalil “deret ukur” dan bukan “deret hitung”;
3. Berperan selaku integrator. Peranan ini amat penting artinya, terutama dalam organisasi yang besar, dan terdiri dari banyak bagian atau komponen, apalagi bagian atau komponen tersebut melakukan kegiatan-

kegiatan yang sifatnya spesialisatis sehingga seolah-olah dapat berdiri secara otonom karena ketergantungannya dengan lain tidak tinggi. Atau, apabila karena lokasi yang berjauhan letaknya yang mengakibatkan pendeklasian wewenang yang luas kepada pimpinan setempat;

4. Peran selaku “bapak”. Adalah suatu hal yang sangat menggembirakan untuk mencatat bahwa dalam kehidupan organisasional, baik di kalangan pemerintahan maupun di lingkungan organisasi-organisasi swasta, sering terdengar istilah “keluarga besar”. Dalam berbagai pertemuan, pada kesempatan berpidato atau memberikan sambutan, istilah tersebut dipergunakan. Jika penggunaannya bukan merupakan hiasan bibir atau sekedar basa-basi, penggunaan istilah tersebut sungguh menggambarkan telah terbinanya kehidupan yang demokratis dalam organisasi dimana para warganya memiliki perasaan seperasaan dan sepenanggungan.

Memainkan peran selaku pendidik. Telah di maklumi bahwa proses mendidik tidak hanya terjadi secara formal, dalam arti hanya terjadi di ruangan sekolah. Jika defenisi klasik tentang pendidikan dipergunakan, maka pendidik adalah usaha yang sistematik untuk mengalihkan pengetahuan seseorang kepada orang lain. Dengan pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa kegiatan mendidik dapat terjadi dimana saja, juga di tempat kerja.

Di dalam permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 3, Disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan permasalahan pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban. melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan seorang pemimpin dengan cara memandu, membimbing, dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja, serta membawa para

pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu perencanaan.

## **2.2 Konsep Pemerintah Desa**

### **2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah desa menurut Saparin (2005:6) ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mengajukan perencanaan peraturan desa, dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Sedangkan pengertian pemerintah desa menurut peraturan daerah tentang pedoman organisasi pemerintah desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Menurut peraturan daerah nomor 7 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan kepala desa adalah pimpinan dari pemerintahan desa. Sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pengertian pemerintah desa dalam hal ini merupakan suatu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan memerintah kepada bawahannya atau seluruh

masyarakat yang didasarkan pada beraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas adalah pemerintahan yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja.

Dari rumusan tersebut, maka pemerintah dapat di artikan sebagai badan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah suatu negara Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul "DESA", mengemukakan bahwa dari segi perbendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal kata Deshi yang artinya "Tanah Kelahiran" atau "Tanah Tumpah Darah". Selanjutnya dari kata deshi itu terbentuk kata desa. Kartohadikoesoemo (2005:16).

Pemerintah desa menurut pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana yang di maksud terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri atas, sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

### **2.2.2 Kepala Desa**

Kepala desa yang dalam hal ini berkependudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan yang strategis dalam membawa masyarakat ke arah tujuan pembangunan desa yang di cita-citakan. Sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 14 yakni kepala desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 14 maka, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan perancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peratusan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan undangan

Dari tugas dan wewenang kepala desa seperti tersebut di atas, maka kepala desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain

menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subjek dan objek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subjek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai objek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin.

## **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Untuk masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan tidak berdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multidimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti

bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Swift dan Levin dalam Alfitri (2011:22) mengatakan pemberdayaan menunjukkan pada usaha relocation of power melalui pengubahan struktur sosial. Rapport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Craig dan Mayo mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep : kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan pemerataan (*equitz*).

Selanjutnya Ifa dalam Alfitri (2011:22) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau gagasan klien.

Pilihan personal dan kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. Pendefinisian kebutuhan adalah kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

Lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Ide gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Sumber: kemampuan

memobilisasi sumber formal, informal dan masyarakat. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelolah mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat desa untuk mampu melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konteks pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat haruslah di awali dengan menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau dikembangkan. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian maka masyarakat tersebut sudah punah. Dengan demikian maka pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi

kemasyarakatan meliputi jangkauan kesejahteraan dari material hingga non material, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Menurut Usman (2012:21) setidak-tidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama kelompok miskin) agar lebih memiliki akses pada pelayanan kesehatan, yaitu (1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (resource allocation), dan (2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (institutional performance).

Menurut Suhendra (2006:75) pemberdayaan masyarakat dapat di artikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelola lingkungan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Leonard D. White dalam Suhendra (2006:77) pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled development). Pemberdayaan

harus berawal dari kemauan politik (politik will), para penguasa. Kemudian menurut Suhendra (2006: 86) indikator masyarakat yang berdaya adalah:

- a. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
- b. Dapat berjalan” bottom up planning”.
- c. Kemampuan dan aktivitas ekonomi .
- d. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
- e. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Disisi lain, Sulistiyan (2004:79) mengatakan pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logik ini di dasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus di gali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki

serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Selanjutnya Sulistiyan (2004:83-84) mengatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus di lalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat desa untuk mampu melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Kartasasmita (1997:76-77) menyatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat di lihat dari tiga sisi:

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk pembangunan daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Pengukuran ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

*Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan eksplorasi yang kuat atas yang lemah.

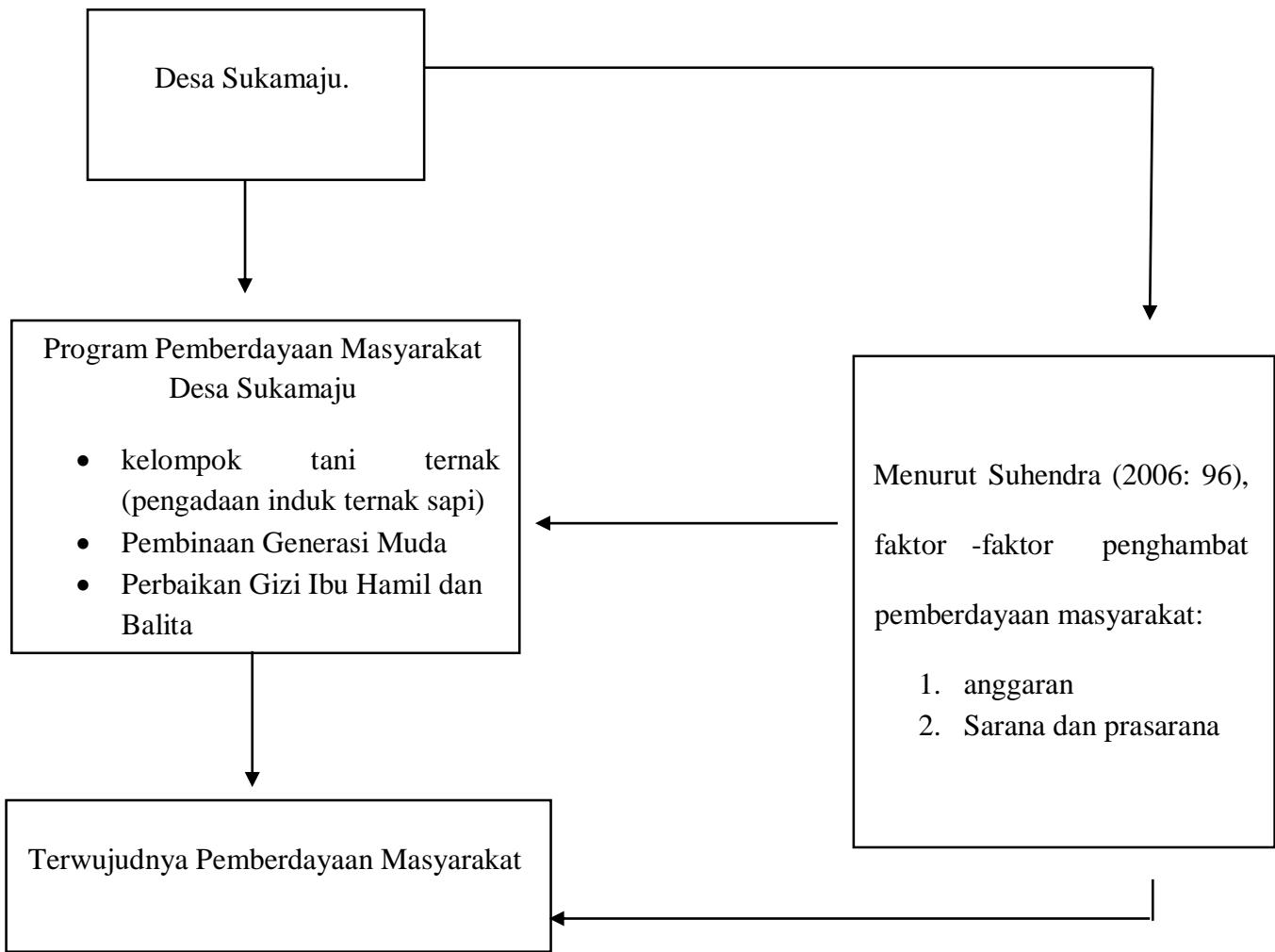
### **2.3.2 Kerangka Pikir**

Amanah undang-undang tentang pengelolaan desa telah diberikan sepenuhnya kepada pemerintah desa sebagai penanggung jawab terselenggaranya pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat diwilayahnya. Konsensus tersebut

perlu di pahami secara seksama, serta dijalankan dengan penuh amanah oleh setiap pemimpin yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah bagian penting dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep pemberdayaan harus di selaraskan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa tepat sasaran dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subjek dan objek pemberdayaan masyarakat.

Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai objek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin. Kerangka fikir dalam penilitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini menyangkut peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan faktor yang menjadi penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di desa sukamaju kecamatan mootilango kabupaten gorontalo.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menetukan metode penelitian yang dipakai, agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Kualitatif. Menurut Hadara Nawawi,” metode penelitian Kualitatif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau menjelaskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang,Lembaga masyarakat, dan sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya”. (Nawawi,2005:67).

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memahami penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioprasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari program yang ada di desa sukamaju kecamatan mootilango yakni:
  - a. Pembinaan generasi muda
  - b. Perbaikan gizi ibu hamil dan balita
  - c. Kelompok Tani Ternak
2. Faktor yang menjadi penghambat peran kemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

### **3.4 Informan**

Sebagai informan awal dipilih secara purposive, objek penelitian yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti (Key Informan = Informan Kunci). Informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi, begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai snow ball sampling yang dilakukan secara serial atau berurutan.

Dalam penelitian ini yang dipandang dapat menjadi informan adalah:

- |    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| a. | Kepala Desa Sukamaju    | : 1 Orang |
| b. | Ketua BPD Desa Sukamaju | : 1 Orang |
| c. | Aparat Desa             | : 2 Orang |
| d. | Masyarakat              | : 4 Orang |

### **3.5 Jenis Data**

Ada dua jenis data yang digunakan yakni:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di tempat penelitian dengan sumber datanya adalah wawancara dan observasi.
2. Data Sekeunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain:

#### 1. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang peranan kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada sumber data dan juga memberikan jawaban secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.

#### 2. Observasi

Observasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan objek penelitian dengan cara mengamati. Tahap awal observasi

dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu untuk mendalami kegiatan yang terjadi jika kaitannya dengan masalah penelitian.

### 3. Dokumentasi

metode ini untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa interaktif (*interactive model analysis*) menurut Miles dan Huberman diterjemahkan oleh (Tjejtep Rohendi 1992:16-20) yang terdiri dari beberapa alur kegiatan,yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berbentuk *soft copy* maupun *hard copy* serta melalui wawancara dengan nara sumber yang berkompeten. Sumber-sumber lain yang menjadi pendukung dalam pengumpulan data adalah teman sejawat yang mempunyai pengetahuan dengan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang dapat memberikan masukan bagi penelitian ini.

#### 2. Reduksi data (*reduction*)

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan tersebut oleh peneliti reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Proses reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

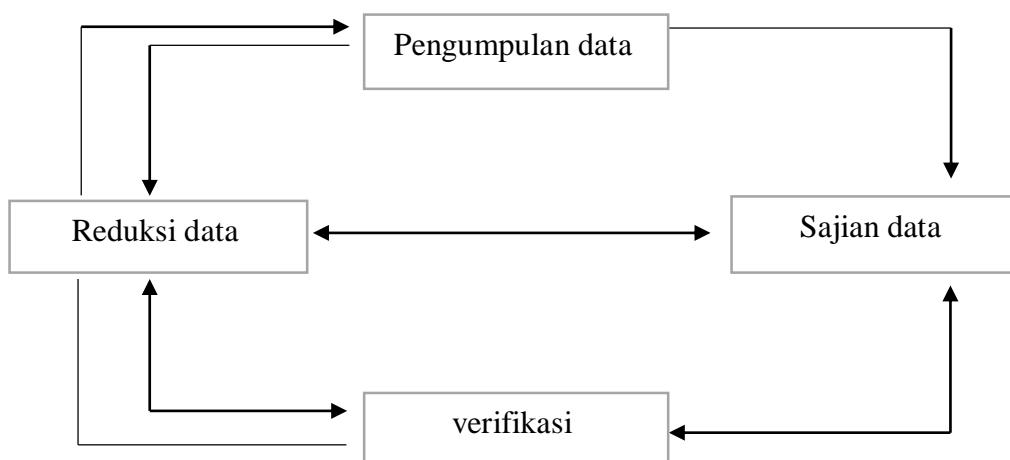
### 3. Penyajian Data (*data display*)

Data yang telah dipilah dan disisihkan diatur menurut kelompok data serta disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

### 4. Menarik Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kegiatan ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:92)

Komponen-komponen analisa data model interaktif tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Sumber: Miles dan A. Michael Huberman diterjemahkan oleh  
(Tjetjep Rohendi 1992, 19-20).

**Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data : Model Interaktif**

### **3.8 Keabsahan data**

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Peneliti melakukan antisipasi melalui langkah-langkah melakukan observasi secara terus menerus, melakukan trialugasi dengan menggunakan sumber perbandingan terhadap apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang menjadi hasil pengamatan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Makna keteralihan dalam proses uji keabsahan data ini adalah, dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan dilakukan untuk mengetahui, mengecek, serta memastika apakah hasil penelitian ini benar atau tidak.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian yang dimaksud adalah penulis berusaha untuk soobjektif mungkin dalam melakukan telaah tentang data temuan. Sehingga ketika terjadi perbedaan, maka penulis melakukan konfirmasi atau kroscek kembali data temuan tersebut dengan focus kajian yang dilakukan. (Maelong,2005).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Batas Wilayah**

Desa sukamaju secara administratif berada pada wilayah kecamatan mootilango di kabupaten gorontalo, provinsi gorontalo. Letak geografis desa sukamaju berada pada rentang koordinat  $122^{\circ}38'51.86''$  BT sampai  $122^{\circ}40'58.99''$  BT dan  $0^{\circ}42'39.08''$  LU sampai  $0^{\circ}49'51.56''$  LU. Desa sukamaju memiliki luasan sebesar  $\pm 21,39 \text{ km}^2$ , secara administratif desa sukamaju memiliki batas sebagai berikut.

1. sebelah utara berbatasan dengan desa tolango
2. sebelah selatan berbatasan dengan desa paris
3. sebelah barat berbatasan dengan desa huyula
4. sebelah timur berbatasan dengan desa helumo

##### **4.1.2 Jumlah Penduduk : 1238 jiwa**

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. laki- laki | : 643 jiwa |
| 2. perempuan  | : 595 jiwa |
| 3. jumlah KK  | : 329 KK   |

##### **4.1.3 Visi dan Misi**

###### **1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Sukamaju adalah:

1. Menuju Sukamaju yang Cerdas, Sejahtera dan Mandiri
2. Tata Laksana Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.

3. Masyarakat Religius

adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

4. Berkeadilan

menjadi dasar ketertiban sosial karena di dalam keadilan terdapat perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat sekaligus. Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat di pahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:

1. Partisipasi aktif
2. Tegaknya hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Berorientasi pada musyawarah untuk mendapatkan mufakat
6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang
7. Efektif dan Ekonomis
8. Dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah di tetapkan misi- misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut . visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian di jabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Misi desa sukamaju adalah:

- Meningkatkan sumber daya manusia melalui Pendidikan formal maupun nonformal.
- Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
- Meningkatkan hasil pertanian melalui penyuluhan pertanian
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas KKN.
- Menciptakan rasa aman bagi masyarakat
- Meningkatkan prestasi generasi pemuda.

### 4.1.4 Tugas Pokok

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai peran kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain di limpahkan kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan Bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan Bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan di tetapkan Bersama BPD
5. Membina perekonomian desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana di maksud, kepala desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa

7. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, sekretaris desa mempunyai peran sebagai berikut:

1. Pelaksana urusan surat-menjurut, kearsipan dan laporan
2. pelaksana urusan administrasi keuangan
3. pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. pelaksana tugas dan peranan kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

### **3. Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan**

Kepala urusan pemerintahan berkedudukan sebagai unsur secretariat, yang bertanggungjawab kepada desa melalui sekretaris desa.

Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas :

1. membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa
2. membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administrative pelaksanaan ketentraman dan keterlibatan masyarakat
3. mengajukan pertimbangan kepada desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa
4. mengajukan pertimbangan kepada desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat
5. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun .

kepala urusan pemerintahan mempunyai peranan:

1. pelaksana kegiatan pemerintahan desa
2. pelaksana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepada desa
4. pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa
5. kedudukan, tugas dan peranan kepala urusan pembangunan
6. kepala urusan pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat , yang bertanggungjawab kepada desa melalui sekretaris desa.

### **4. Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan**

Tugas kepala seksi kesejahteraan

1. membantu kepala desa dalam menyusun perencanaan,melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas sektor-sektor kesejahteraan rakyat meliputi:
2. menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam konteks pengorganisasian kesejahteraan masyarakat.
3. Mengumpul dan menyusun laporan tentang masalah kesejahteraan rakyat
4. Inventarisasi dan pelaporan kegiatan urusan kesejahteraan masyarakat
5. Memobilisasi partisipasi masyarakat dalam hal kesejahteraan rakyat.
6. Memberikan layanan kepada masyarakat di bidang tugasnya.
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa sesuai dengan tugas utama mereka.

## **5. Kepala Seksi (KASI) Pelayanan**

Tugas kepala seksi pelayanan:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

## **6. Kepala Urusan Pembangunan dan Perencanaan**

Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas:

1. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
2. Membantu perekonomian desa
3. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa
4. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa

Kepala urusan pembangunan mempunyai peranan:

1. Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa
2. Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
3. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang di limpahkan oleh kepala desa
4. Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa

## **7. Kepala Urusan Umum**

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa

Kepala urusan umum mempunyai tugas:

1. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
3. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
4. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
5. Membina dan melayani administrasi kependudukan
6. Membina dan melayani perizinan.

Kepala urusan mempunyai peranan:

1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
3. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

## **8. Kepala Urusan Keuangan**

1. Tugas utama: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan untuk persiapan APB desa.
2. fungsi :
  - implementasi pengelolaan keuangan desa
  - persiapan penyusunan APB desa
  - melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

## **9. Kepala Dusun**

1. membantu tugas kepala desa di wilayah kerjanya
2. melakukan pelatihan untuk meningkatkan swadaya masyarakat dan kerjasama masyarakat

3. melakukan kegiatan informasi tentang program pemerintah untuk masyarakat
4. bantu kepala desa dalam membina dan mengoordinasi kegiatan RW(RT) dan RT(RT) dan di wilayah kerjanya.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. untuk mengoordinasikan jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan dan pengembangan masyarakat di daerah dusun.
2. melakukan tugas di bidang pengembangan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
3. melakukan bisnis untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dan untuk mendorong pembangunan ekonomi.
4. melakukan kegiatan dalam konteks membina dan menjaga perdamaian dan ketertiban umum.
5. melakukan fungsi lain yang didelegasikan oleh kepala desa.

## **10. BPD (Badan Perwakilan Desa)**

Tugas :

1. diskusikan desain peraturan desa dengan kepala desa
2. mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan kepala desa
4. membentuk komite pemilihan kepala desa
5. menggali, menampung , rumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

## 6. menyusun tata tertib BPD

Hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desaMenyatakan pendapat Kewajiban
2. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Memproses pemilihan kepala desa
7. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
8. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **4.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.**

Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pembangunan di desa, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara kepala desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai perannya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah di programkan.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan apparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kebanyakan kepala desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu di tambah sikap

masyarakat yang bersifat paternalistik. Kedua, kepala desa mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung .

#### **4.2.2 Pembinaan Generasi Muda**

Generasi muda adalah satu komponen masyarakat yang perlu diperhatikan terlibat dalam pembangunan desa, karena memiliki potensi sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa. Pada dasarnya, generasi muda berusia lima belas hingga dua puluh lima tahun. Demikian pula dalam hal semangat idealisme, generasi muda dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kreativitas dan ide-ide baru dalam memandang suatu masalah.

Dalam upaya mempersiapkan, mengembangkan dan memberdayakan generasi muda untuk dapat berpartisipasi sebagai perilaku pengembangan aktif, itu akan dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan, misalnya dengan munculnya masalah sosial yang melibatkan atau dilakukan oleh generasi muda seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, zat adiktif lainnya, minuman keras, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Jika salahnya tidak dapat kepedulian atau penanganan sesuai dengan konsepnya, dikhawatirkan akan terjadi memiliki dampak luas dan mengganggu kesinambungan serta stabilitas dalam proses pengembangan.

Cepat atau lambat, ini akan mengancam pembentukan moral yang kuat di generasi muda. Tantangan ini belum dirumuskan kebijakan pengembangan pemuda secara harmonis, komprehensif, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan pemerintah pusat sampai kebijakan yang ada di desa.

Untuk itu, seorang kepala desa harus melaksanakan perannya secara maksimal dalam upaya untuk pembinaan generasi muda. hasil wawancara dengan kepala desa sukamaju di katakan bahwa :

“Awalnya itu pembinaaan dari karang taruna yang kita sudah bentuk di desa ini, kemudian bidang pertama itu mengenai karakter mereka kemudian kita anggarkan lalu di kembangkan di bidang olahraga. Kita giatkan kegiatan-kegiatan olahraga yang bermanfaat untuk mereka supaya bakat mereka bisa tersalur dan berikutnya ada kesibukan lain mereka selain bekerja untuk nafkah mereka, maka otomatis kenakalan-kenakalan remaja akan berkurang dengan adanya kegiatan itu, dan setiap bulannya kita pantau kegiatan mereka yang bermanfaat bagi mereka sendiri.” (kepala desa, 23 Desember 2019).

kepala desa dan generasi muda terjalin hubungan komunikasi yang baik dalam arti kepala desa mau mengajak generasi muda untuk berkomunikasi terkait pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini kepala desa mempunyai strategi untuk pembinaan dan memotivasi generasi muda agar berpartisipasi dalam pembangunan desa. Partisipasi kepala desa dengan tujuan meningkatkan partisipasi generasi muda terhadap pembangunan desa, kepala desa sebagai pembina sekaligus sebagai pemimpin dalam kegiatan selalu melibatkan karang taruna dalam pembangunan yang sedang berlangsung baik pembangunan fisik ataupun nonfisik. Untuk itu kepala desa harus mempunyai strategi yang tepat dalam pembinaaan generasi muda ,Seperti hasil wawancara dengan kepala desa sukamaju:

“sebenarnya untuk strategi yang khusus tidak ada, tapi kami selalu melibatkan karang taruna dalam setiap kegiatan yang ada di desa, sasaran kami untuk meningkatkan rasa kepedulian mereka terhadap desa dan mengisi kekosongan waktu mereka agar terhindar dari hal-hal negatif seperti miras. Jadi karang taruna

ini bisa menjembatani para pemuda berkratifitas dan bersosialisasi yang nantinya bisa diharapkan lebih baik dari sebelumnya.” (kepala desa, 23 Desember 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa karang taruna telah melakukan kegiatan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi pemuda dengan melibatkan pemuda secara penuh dalam semua kegiatan yang dilakukan di desa. Dalam konteks ini strategi yang dilakukan dalam memberdayakan potensi pemuda dibahas bersama dengan kepala desa dalam rapat awal, dan dalam rapat tersebut dilakukan pembagian proporsi tugas secara merata sehingga setiap pemuda mendapat tugas dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Untuk dapat membagi tugas secara merata maka setiap pemuda mendapat tugas secara bervariasi sehingga setiap pemuda akan memperoleh pengalaman untuk melaksanakan berbagai hal yang terkait dengan masalah tekniks atau masalah substansial pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini sangat positif dalam memberikan pengalaman kepada pemuda dalam melaksanakan program yang ada di desa.

Sesuai hasil wawancara dengan pemuda yang ada di desa sukamaju mengenai antusias dan dukungan pemuda dalam pembinaan generasi muda, responden ini menjawab:

“Para pemuda yang ada di desa ini sangat bersemangat dan memiliki antusias yang tinggi untuk ikut terlibat dalam kegiatan kepemudaan. Mereka saling bahu membahu dalam bekerja, dan sebagian besar sangat simpati dengan kegiatan yang dilakukan. Meskipun terdapat beberapa orang pemuda yang kurang proaktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan namun hal tersebut kurang mempengaruhi semangat serta antusias dan dukungan pemuda dalam mendukung kegiatan karang taruna yang ada di desa.” (masyarakat, 23 desember 2019)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada umumnya para pemuda yang ada di desa ini sangat bersemangat dan memiliki antusias yang tinggi untuk ikut terlibat dalam kegiatan kepemudaan. Dalam konteks ini pemuda yang ada di desa saling bahu membahu dalam bekerja, dan sebagian besar sangat simpati dengan kegiatan yang dilakukan. Namun responden ini mengakui bahwa terdapat oknum pemuda yang kurang proaktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan namun hal tersebut kurang mempengaruhi semangat serta antusias dan dukungan pemuda dalam mendukung kegiatan dalam proses pembinaan generasi muda. Dalam konteks ini secara umum para pemuda sangat antusias untuk mengikuti kegiatan kepemudaan dan secara proaktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai hasil wawancara dengan pemuda di desa sukamaju mengenai keterlibatan pemuda dalam proses pembinaan generasi muda yang ada di desa sukamaju, responden ini menjawab:

“Saya sebagai pemuda yang ada di desa merasa terberdayakan dengan adanya kegiatan karang taruna dan dilibatkan dalam kegiatan yang ada di desa walaupun memang masih ada pemuda yang masih memiliki sifat apatis yang tidak ikut memberikan kontribusi dalam kegiatan yang ada di desa. Di samping itu kepala desa juga memberi dukungan untuk mengembangkan potensi kami dalam bidang olahraga, Dalam konteks ini saya merasakan bahwa kegiatan karang taruna mampu memberdayakan potensi pemuda sehingga para pemuda dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki bagi pengembangan kemampuan pemuda.” (masyarakat,23 desember)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemuda yang ada di desa merasa terberdayakan dengan adanya kegiatan karang taruna yang dilaksanakan di desa. Para pemuda memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas

sehingga mereka memperoleh pengalaman yang sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi diri pemuda yang ada di desa.

Dari infomasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa sukamaju telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program pembinaan generasi muda, sebagian pemuda memiliki semangat dalam mengikuti setiap program pembinaan generasi muda melalui karang taruna. Namun dalam hal ini, ada juga sebagian pemuda masih apatis dalam mengikuti proses pembinaan generasi muda dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa.

#### **4.2.3 Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita**

Masalah gizi seimbang di Indonesia masih merupakan masalah yang cukup berat. Kekurangan atau kelebihan makanan pada masa hamil dapat berakibat kurang baik bagi ibu dan janin. Sejak dahulu kala makanan wanita hamil telah dianggap sangat penting, sebab orang percaya bahwa makanan yang benar akan memberi dampak yang baik bagi janin. Sehingga masyarakat membuat berbagai aturan makanan yang boleh dimakan ibu hamil dan makanan yang ditabukan, yang mana hal tersebut ternyata sama sekali tidak benar dilihat dari segi kesehatan.

Gizi ibu pada waktu hamil sangat penting untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya. Angka kejadian BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) lebih tinggi dinegara-negara yang sedang berkembang daripada dinegara-negara yang sudah maju. Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang rendah mempengaruhi diet ibu. Gizi ibu yang baik diperlukan agar pertumbuhan janin berjalan pesat dan tidak mengalami hambatan. Dimulai dari satu sel telur yang setelah dibuahi

tumbuh dengan pesat, sehingga diperkirakan pertumbuhan janin sejak konsepsi sampai lahir.

Berdasakan pada hasil survey awal menggambarkan bahwa masih banyak para ibu rumah tangga produktif (usia subur) masih kurang memahami mengenai kesehatan Ibu dan anak. Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak bagi pengembangan kesehatan ibu dan anak masih belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Hal ini karena keterbatasan jumlah kader yang ada. Program posyandu yang berjalan selama ini masih terbatas pada penimbangan balita yang terjadwal satu bulan sekali. Sedangkan mengenai penyuluhan program kesehatan Ibu dan Anak belum dilaksanakan secara optimal.

Pada dasarnya program kesehatan ibu dan anak merupakan program pengembangan kesehatan ibu/ perempuan. Perempuan adalah tulang punggung sebuah negara terlebih lagi seorang ibu, apabila tulang punggung negara itu rapuh maka tidak akan bisa menopang keberlangsungan hidup sebuah negara. Hal ini berarti kesehatan sebuah negara tergantung kepada seberapa sehatnya para ibu. Karena para ibu yang menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Sejahteranya sebuah bangsa tergantung seberapa kuatnya kondisi perekonomian seorang ibu. Karena ibu yang mengatur dan menata ekonomi keluarga yang merupakan miniatur sebuah Negara. Seperti hasil wawancara dari kepala desa sukamaju mengenai program perbaikan gizi ibu hamil dan balita:

“awalnya kita harus anggarkan untuk program ibu hamil dan kita awali dengan penyuluhan stanting. yang kedua perlindungan anak kedua ini ada hubungan. Jadi setiap bulan itu kita wajibkan setiap ibu hamil, balita ataupun ibu yang memiliki anak balita di wajibkan harus datang ke posyandu sebulan sekali, disamping itu dalam tahun ini ibu hamil kita adakan latihan pos gizi ibu hamil selama 12 hari bgitu pula untuk anak-anak balita kita adakan post gizi untuk bayi balita selama

12 hari dan apabila ada masyarakat yang tidak peduli itu langsung kita datangi dan kita upayakan harus datang dan Alhamdulillah bisa teratasi semua itu karna mulai tahun kemarin kita sudah mengatasi adanya stanting di setiap desa yang ada di kabupaten gorontalo.” (kepala desa, 23 desember 2019)

Program Posyandu merupakan perubahan sosial akan membawa sebuah konsekuensi tersendiri bagi masyarakat pedesaan. Bentuk perubahan tersebut baik yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan positif seperti manfaat yang diperoleh dengan adanya kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun selama ini masyarakat di Desa Sukamaju di nilai kurang sadar akan kemudahan yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan konsekwensi yang kurang positif.

Sedangkan persepsi tenaga medis dan kader Posyandu terhadap pelaksanaan program Posyandu adalah positif. Mereka menganggap penting dilaksanakannya program tersebut, tidak hanya sekedar melaksanakan program formal dan menjadikan kegiatan rutin saja (penimbangan balita, pemberian PMT, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan tensi, konsultasi kesehatan) melainkan memiliki fungsi yang sangat besar bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, terutama yang menyangkut masalah kesehatan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai posyandu harus dilakukan penyadaran pada masyarakat mengenai peran penting dan manfaat posyandu. Dengan demikian akan terbentuk persepsi positif di kalangan

masyarakat. Dengan persepsi yang positif, maka partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan meningkat. Namun demikian, tampaknya yang masih perlu diluruskan adalah pemahaman yang masih terlalu sederhana tentang program Posyandu tersebut. Dalam pandangan masyarakat, program Posyandu merupakan program rutin dilaksanakan tiap bulan pada minggu keempat dalam rangka melakukan penimbangan balita untuk mengetahui tingkat perkembangan balita. oleh karena itu terkadang aparat desa sering mengalami masalah-masalah yang dihadapi dalam program perbaikan gizi ibu hamil dan balita dalam posyandu, Seperti yang dikatakan salah satu informan:

“Kami setiap bulan secara rutin memberikan penyuluhan, namun pemanfaatan posyandu oleh masyarakat masih rendah seperti ibu hamil dan balita kita sudah anjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan dan mengimbau warga untuk membawa anaknya ke posyandu setiap bulannya, tapi masih banyak warga yang kurang paham.” (aparat desa 23 desember 2019)

Tingkat ketercapaian tujuan program posyandu di desa sukamaju masih perlu diukur atau dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi program posyandu perlu dilihat dari semua unsur seperti sumberdaya manusia, sarana, dan partisipasi masyarakatnya. Dalam pencapaian tujuan kegiatan Posyandu selama ini banyak unsur yang menjadi pendukungnya seperti tingkat pendidikan tenaga medis, partisipasi masyarakat, keterlibatan kader Posyandu, tim penggerak PKK, serta komitmen pemerintahan desa. Semua elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program posyandu. Adanya pemberitahuan atau sosialisasi tentang program posyandu sangat membantu pengetahuan masyarakat dan

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu. Seperti hasil wawancara dari salah satu informan :

“dari kadernya langsung pak kadang juga aparat desa, misalnya klo ada apa-apa mereka yang langsung kasitau. Terus mereka mengumumkan jugakan lewat masjid, biasanya pagi-pagi sudah langsung di umumkan. kader juga sering mengingatkan, terus juga ada tetangga yang selalu ingatkan kalo pas mau berangkat ke posyandu.” (masyarakat, 23 desember 2019)

Terkait dengan keberadaan posyandu, salah satu informan juga mengungkapkan mengenai tanggapan program perbaikan gizi ibu dan balita.

“sejauh ini saya pribadi merasakan program yang ada di desa mengenai perbaikan gizi ibu hamil dan balita, kepala desa atau pun aparat desa selalu sampaikan kepada kami pentingnya untuk perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Tapi memang masih ada sebagian masyarakat yang memang tidak mengikuti program-program yang di jalankan di desa.” (masyarakat 23 desember 2019)

Dengan keaktifan masyarakat untuk datang dan memanfaatkan pelayanan kesehatan di posyandu dapat mencegah dan mendeteksi secara mungkin gangguan dan hambatan pertumbuhan pada balita. Misalnya pada permasalahan gizi buruk anak balita, kekurangan gizi dan kesehatan ibu hamil akan mudah dihindari melalui kegiatan posyandu. Sehingga posyandu sebagai layanan kesehatan yang sangat dekat pada masyarakat sangat berperan penting dalam deteksi dini masalah gizi.

Kecukupan asupan zat gizi bagi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin yang dikandungnya, beberapa ibu kurang menggetahui kandungan nutrisi yang baik untuk dikonsumsi pada saat kehamilan, kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan posyandu juga mempengaruhi

tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya kesehatan gizi ibu hamil dan balita.

#### **4.2.4 Kelompok Tani Ternak**

Masyarakat desa pada umumnya melakukan pekerjaan sampingan diluar profesi utamanya. Misalnya seorang petani masih akan memiliki pekerjaan sampingan seperti bekerja sebagai buruh bangunan, buruh angkut batu, buruh angkut pasir, buruh dan buruh macul. Begitu pula pekerjaan sebagai peternak ayam, kambing, sapi atau binatang lainnya hanya sebatas pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utama sebagai petani. Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, namun dalam usahanya untuk mengembangkan peternakan tersebut perlu adanya saling kerjasama di antara berbagai pihak atau stakeholder, seperti bekerjasama dengan institusi pemerintahan atau swasta maupun dengan sesama peternak atau golongan yang sederajat.

Desa Sukamaju merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan mootilango Kabupaten gorontalo. Penduduk desa Sukamaju didominasi oleh masyarakat petani yang memiliki banyak potensi yang bisa untuk dikembangkan, salah satu nya adalah dalam bidang peternakan sapi. Ketidakberdayaan masyarakat petani untuk mengembangkan potensi ternak sapi di Desa Sukamaju dipengaruhi oleh ketidakadaan modal. Berangkat dari permasalahan tersebut, Kepala Desa Sukamaju menginstruksikan kepada masyarakat untuk membentuk kelompok peternak sapi sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ternak sapi. Kelompok yang terbentuk disebut kelompok tani ternak, yang beranggotakan petani yang

ingin mengembangkan ternak sapi. Di Desa Sukamaju terdapat beberapa kelompok tani ternak yang tersebar di desa, yang mana disetiap kelompok terdapat beberapa orang. Program yang dilakukan oleh kelompok tani ternak tersebut adalah pembibitan dan penggemukan sapi.

Kegiatan dilaksanakan dengan cara pembinaan terhadap kelompok tani ternak oleh Kepala desa Sukamaju yang kerjasama dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam bidang peternakan sapi, seperti pemerintah dan Peternak yang sudah sukses. Kegiatan pengkpasitasan dilaksanakan dengan cara pelatihan melalui kelompok tani ternak yang sudah dibentuk. Seperti hasil wawancara dari kepala desa Sukamaju terkait program kelompok tani ternak :

“Ini adalah salah satu cara kita memberdayakan masyarakat lewat pengembangan ternak sapi agar menjadi maju dan sejahtera. Bantuan ini agar dirawat dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, Oleh karena itu, bantuan sapi ini kedepan akan kita evaluasi kembali, sudah sampai dimana dan bagaimana perkembangan bantuan sapi. Apakah peternak ini memelihara dengan baik, termasuk melihat kendala dan permasalahannya di lapangan.” (kepala desa,10 januari 2020 )

kelompok tidak mungkin berkembang jika individu individu yang menjadi anggota dari kelompok itu belum memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Sebaliknya, individu tidak akan optimal untuk mengembangkan dirinya tanpa berkelompok, karena baik dari segi ekonomi terlebih segi sosial, optimalisasi tujuan akan tercapai jika ada sinergi positif diantara individu-individu dalam bentuk kelompok. Oleh sebab itu, sebenarnya titik sasaran dari pemberdayaan masyarakat petani ternak merupakan peningkatan

kesadaran, kapasitas dan kemampuan individu petani untuk mengembangkan dirinya dan kelompoknya menjadi lebih baik.

Dalam hal ini kelompok membuat komitmen dengan kepala desa bahwa tidak bisa menjual sapi bantuan tersebut ketika sapi belum menghasilkan anak, tapi di kenyataanya di lapangan ada saja yang menjual sapi tersebut. Seperti apa yang di katakan kepala desa sukamaju:

“Kita sudah memberikan bantuan sapi itu sekitar 30 ekor di awal-awal itu giliran, kemudian yang ke dua itu langsung di miliki tanpa ada guliran. ada juga yang menjual tapi pada saat sapi tidak terselamatkan contohnya sakit atau kecelakaan tetapi klo mereka memaksakan tetapi mereka pamit dulu kita bikin perjanjian anda bisa menjual untuk kebutuhan mendadak dengan konsekuensi harus di ganti lagi sapi tersebut.” (kepala desa, 10 januari 2020)

Dalam hal ini kelompok ternak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengembangkan ternak sapi dengan mengandalkan segala kemampuan, pengetahuan, pengalamannya dan berkewajiban dalam mengembangkan usahanya sesuai juknis, serta kelompok wajib memberikan laporan perkembangan kegiatannya. Di samping adanya surat perjanjian, kelompok juga menandatangi surat kesanggupan kelompok dimana kelompok penerima bantuan sanggup dan bersedia memelihara kandang dengan baik, tidak menjual kandang atau memindah tangankan kepada pihak lain. Kepala desa sukamaju akan memberikan ganjaran bagi masyarakat yang menjual sapi bantuan tersebut. Berikut hasil wawancara dari kepala desa sukamaju:

“Jika sapi yang di jual tidak di ganti maka kita memberikan ancaman sanksi akan saya keluarkan dari program desa, itu merupakan efek jera buat mereka supaya mereka tdk menjual nanti setelah sapinya lahir baru bisa di jual itu hak mereka.” (kepala desa, 10 januari 2020)

Dengan demikian, saya dapat simpulkan bahwa kepala desa suka maju memberdayakan masyarakat lewat pengembangan ternak sapi agar menjadi maju dan sejahtera. Di samping itu, masih ada masyarakat yang tidak menaati kesepakatan yang ada seperti menjual sapi bantuan. Tapi ada juga sebagian masyarakat menjual sapi tersebut dengan alasan sapi tersebut sakit atau pun akan di ganti dengan sapi yang lebih sehat lagi. Kepala desa akan memberikan ganjaran bagi masyarakat yang tidak mengikuti kesepakatan yang sudah di tentukan berupa di keluarkan dari program desa.

#### **4.2.5 Faktor Penghambat Dari Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.**

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan.

Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Berikut merupakan

hasil wawancara dari kepala desa sukamaju mengenai faktor penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat:

“Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal pemberdayaan kan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehingga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Karena kelancaran proses pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.” (kepala desa, 10 januari 2020)

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu aparat desa:

“Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kepala desa, hal ini karena warga desa cenderung kurang perduli dan lebih sibuk bekerja, sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi berkat kegigihan kepala desa dalam mengajak warganya dan mendekatkan diri dengan masyarakat desa, sedikit demi sedikit masyarakat mulai membuka diri dan mulai tertarik untuk berpartisipasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.”(aparat desa, 10 januari 2020)

faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan dalam desa adalah keberadaan pemanfaatan dana desa dan sarana prasana. Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan harapan apabila di dukung oleh dana desa dan sarana prasarana yang akan memperlancar pembangunan desa. kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi roda pembangunan dalam desa. sesuai dengan hasil wawancara kepala desa

mengenai anggaran dana desa dan sarana prasarana dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat :

“Hambatan terbesar adalah pengaruh dari orang luar kalo dari segi anggaran tidak ada, kecuali untuk sarana prasarana. Semua masyarakat minta pembangunan secara merata tapi pembangunannya tidak sekalian, harus bertahap disitu juga hambatan, maunya masyarakat harus sekalian, kan tidak mampu dengan anggaran. Kalo masalah transparansi anggaran di bahas di pertemuan-pertemuan dan rapat untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jdi kendalanya itu masyarakat mau semua dusun harus ada pembangunan, kan tidak mungkin semua harus bertahap.” (kepala desa, 10 januari 2020)

Masyarakat juga harus di dorong untuk menebah rasa partisipasi mereka. Bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Dimana partisipasi masyarakat itu sendiri memiliki makna yang sangat beragam. Keberagaman tersebut tentu saja mengandung arti keberagaman pula dalam praktek partisipasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat suatu program tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Hasil wawancara dengan ketua BPD mengenai peran kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.

“beliau sering berkoordinasi dengan saya mengenai program yang ada di pemerintahan desa, sejauh ini saya menilai beliau sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun terkadang masih ada hambatan-hambatan yang sering di hadapi beliau di lapangan.” (ketua BPD, 23 desember 2019)

Dalam mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerjasama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat di perlukan kerjasama antara pemimpin dan yang di pimpin.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat.**

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. selain dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. sebagaimana di atur dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki peran dan kedudukan sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berkerja

sama dengan organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudaan. Organisasi yang dimaksud di atas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dengan merencanakan melalui rapat musbangdes yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah (*bottom-up*).

Sulistiyani (2004:79) mengatakan pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, pada dasarnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya tapi kadang mereka tidak menyadari akan hal itu, maka kemampuan tersebut harus di gali dan dikembangkan.

Di Desa Sukamaju terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi Pembinaan Generasi Muda, Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita, dan Bantuan Kelompok Tani Ternak.

#### **4.3.2 Pembinaan Generasi Muda**

Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang di pimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa.

Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat disini lebih di tujuhan pada generasi muda, tujuannya dalam upaya mempersiapkan, mengembangkan dan memberdayakan generasi muda agar dapat berkreatifitas sehingga mereka memperoleh pengalaman yang sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi diri pemuda yang ada di desa sukamaju. disisi lain agar generasi muda terhindar dari perbuatan asusila seperti mengkonsumsi minuman keras, berjudi , merampok, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, HIV /AIDS dan penyakit menular lainnya.

Dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa kepala desa sukamaju telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program pembinaan generasi muda, sebagian pemuda memiliki semangat dalam mengikuti setiap program pembinaan generasi muda melalui organisasi kepemudaan yakni karang taruna. Namun disisi lain juga, ada sebagian pemuda masih apatis dalam mengikuti proses pembinaan generasi muda dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa.

#### **4.3.3 Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita**

Masalah gizi seimbang di Indonesia masih merupakan masalah yang cukup berat. Kekurangan atau kelebihan makanan pada masa hamil dapat berakibat kurang baik bagi ibu dan janin. Sejak dahulu kala makanan wanita hamil telah dianggap sangat penting, sebab orang percaya bahwa makanan yang benar akan memberi dampak yang baik bagi janin. Sehingga masyarakat membuat berbagai

aturan makanan yang boleh dimakan ibu hamil dan makanan yang ditabukan, yang mana hal tersebut ternyata sama sekali tidak benar dilihat dari segi kesehatan.

Program Posyandu merupakan perubahan sosial akan membawa sebuah konsekuensi tersendiri bagi masyarakat pedesaan. Bentuk perubahan tersebut baik yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan positif seperti manfaat yang diperoleh dengan adanya kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun selama ini masyarakat di Desa Sukamaju di nilai kurang sadar akan kemudahan yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan konsekwensi yang kurang positif.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahwa masih banyak ibu rumah tangga produktif masih kurang memahami mengenai kesehatan ibu hamil dan balita. Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak bagi pengembangan kesehatan ibu hamil dan balita masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala desa dan aparat desa telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk memeriksa kesehatan ibu hamil dan balita tapi masih banyak warga yang enggan datang ke posyandu untuk memeriksakan kondisi kesehatan ibu hamil dan balita. Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan posyandu juga mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya kesehatan gizi ibu hamil dan balita.

#### **4.3.4 Kelompok Tani Ternak**

Desa Sukamaju merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan mootilango Kabupaten gorontalo. Penduduk desa Sukamaju didominasi oleh masyarakat petani yang memiliki banyak potensi yang bisa untuk dikembangkan, salah satu nya adalah dalam bidang peternakan sapi. Ketidakberdayaan masyarakat petani untuk mengembangkan potensi ternak sapi di Desa Sukamaju dipengaruhi oleh ketidakadaan modal. Berangkat dari permasalahan tersebut, Kepala Desa Sukamaju menginstruksikan kepada masyarakat untuk membentuk kelompok peternak sapi sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ternak sapi. Kelompok yang terbentuk disebut kelompok tani ternak, yang beranggotakan masyarakat yang ingin mengembangkan ternak sapi. Di Desa Sukamaju terdapat beberapa kelompok tani ternak yang tersebar di di desa, yang mana disetiap kelompok terdapat beberapa orang. Program yang dilakukan oleh kelompok tani ternak tersebut adalah pembibitan dan penggemukan sapi.

Salah satu strategi yang dapat didayagunakan di dalam meningkatkan kualitas masyarakat sehingga memiliki keberdayaan adalah peningkatan peran kelompok tani ternak. Sampai saat ini kelompok tani ternak masih digunakan sebagai pendekatan utama dalam kegiatan penyuluhan. Pendekatan kelompok dipandang lebih efisien dan dapat menjadi media untuk terjadinya proses belajar

sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau berkualitas.

Berdarkan hasil penelitian bahwa kepala desa suka maju memberdayakan masyarakat lewat pengembangan ternak sapi agar menjadi maju dan sejahtera. Di samping itu, masih ada masyarakat yang tidak menaati kesepakatan yang ada seperti menjual sapi bantuan. Tapi ada juga sebagian masyarakat menjual sapi tersebut dengan alasan sapi tersebut sakit atau pun akan di ganti dengan sapi yang lebih sehat lagi. Kepala desa akan memberikan ganjaran bagi masyarakat yang tidak mengikuti kesepakatan yang sudah di tentukan berupa di keluarkan dari program desa.

#### **4.3.5 Faktor Penghambat Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat.**

##### **1. Partisipasi Masyarakat**

Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya tentang suatu program yang di selenggarakan pemerintah desa.

Hambatan yang sering muncul ketika partisipasi masyarakat terhadap suatu program pemerintah kurang maksimal bisa secara internal, berupa hambatan

sosio-kultural, dan eksternal dan hambatan dari birokrasi pemerintah (Miftah Thoha,2008:17).

Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.

Berdasarkan temuan peneliti partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat dari proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat cenderung kurang peduli dengan program pemberdayaan masyarakat dan lebih memilih untuk bekerja. Pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi.

## **2. Anggaran dan Sarana Prasarana**

Anggaran dan sarana prasarana yang lengkap dengan tujuan proses pemberdayaan akan dapat membantu pencapaian hasil belajar yang optimal. program pemberdayaan yang kurang berhasil atau gagal mencapai tujuan tentu disebabkan oleh berbagai kendala. Suhendra (2006:96) mengemukakan bahwa “ada beberapa

faktor yang menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya adalah anggaran dan sarana prasarana yang menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pemerintah desa membutuhkan anggaran dan sarana prasarana dalam menjalankan fungsinya, tersedianya anggaran dan sarana prasarana menunjang lancarnya suatu kegiatan yang di laksanakan. Di desa sukamaju, sarana prasarana menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat. ketidakmauan setiap dusun untuk mendapatkan sarana prasana berupa jamban secara bertahap bisa menghambat program pemberdayaan di sektor lain. mereka menolak jika pembangunan di lakukan secara bertahap, keinginan mereka pembangunan sarana prasana di lakukan secara menyeluruh tanpa bertahap, dengan keinginan seperti itu anggaran tidak cukup dan akan menghambat proses kegiatan pemberdayaan masyarakat pada sektor lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang peran kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepala desa sukamaju telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program pembinaan generasi muda, sebagian pemuda memiliki semangat dalam mengikuti setiap program pembinaan generasi muda melalui karang taruna. Namun dalam hal ini, ada juga sebagian pemuda masih apatis dalam mengikuti proses pembinaan generasi muda dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa. begitu juga dalam program perbaikan gizi ibu hamil dan balita, beliau sudah memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan gizi ibu hamil dan balita serta pemanfaatan posyandu. Ada sebagian warga yang datang, ada juga warga yang tidak datang dalam hal kegiatan posyandu. Untuk program Kelompok Tani Ternak Kepala desa telah memberikan bantuan sapi tersebut kepada kelompok tani yang ada di desa sukamaju, beliau akan memberikan ganjaran berupa di keluarkan dari program desa ketika mendapati masyarakat menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan beliau. Dari hasil penemuan peneliti ada beberapa faktor yang menghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yakni kurangnya partisipasi masyarakat, faktor external dan sarana prasarana.

## 5.2 Saran

1. peningkatan peran kepala dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih di optimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa sukamaju semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial.
2. meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai objek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitri. 2011. *Community development, teori dan aplikasi*. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Kartasasmita. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetadjo. 2005. *DESA*. PN. Balai Pustaka, Jakarta. Kartono, Kartini. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Kepemimpinan Mengaktifkan Organisasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta, bandung.
- Riduwan. 2009. *Metode & Teknik Menusun Proposal Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, Sondang. 2007. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. CV Haji Masagung, Jakarta.
- Saparin. 2005 . *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siswanto. 2008. *Teori dan Perilaku organisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugianto. 2006. *Filsafat Ilmu*. Intimedia, Bandung.

- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Terry, George R. 2007. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjetjep, Rohendi. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

**Dokumen :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. Departemen dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Mentari Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Departemen Dalam Negeri.

## **Lampiran**

Lampiran 1 pedoman wawancara penelitian

Lampiran 2 dokumentasi bersama kepala desa, aparat desa dan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamantan Mootilango

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 5 Hasil Uji Turnitin

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

## **Pedoman wawancara**

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan  
Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango.

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan generasi muda?
2. Apa saja strategi yang tepat dalam pembinaan generasi muda?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pembinaan generasi muda di desa sukamaju?
4. Sejauhmana keterkaitan masyarakat dalam proses pembinaan generasi muda?
5. Bagaimana peran kepala desa dalam program perbaikan gizi ibu hamil dan balita?
6. Masalah masalah apa saja yang sering terjadi dalam proses posyandu?
7. Pada persiapan posyandu, apakah aparat desa/ kader memberitahukan kepada masyarakat?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program pembinaan ibu hamil dan balita?
9. Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam program bantuan kelompok tani pengadaan induk ternak sapi?
10. Sudah sejauh mana program ini di jalankan?
11. Apa hukuman untuk masyarakat yang menjual sapi tersebut?
12. Faktor apa saja yang menghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat?

13. Apakah faktor anggaran dan sarana prasarana menjadi faktor penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat?
14. Bagaimana peran kepala desa terhadap program pemberdayaan masyarakat?



Masyarakat, Ibu Sela dunggio



Masyarakat,BapakSafrudiTuna



Masyarakat, arfandy pakaya



Masyarakat,Ibu Herlina Yusuf



Kepala Desa, Bapak Halid M. Salehe



Aparat Desa, Bapak Melkian Hamu



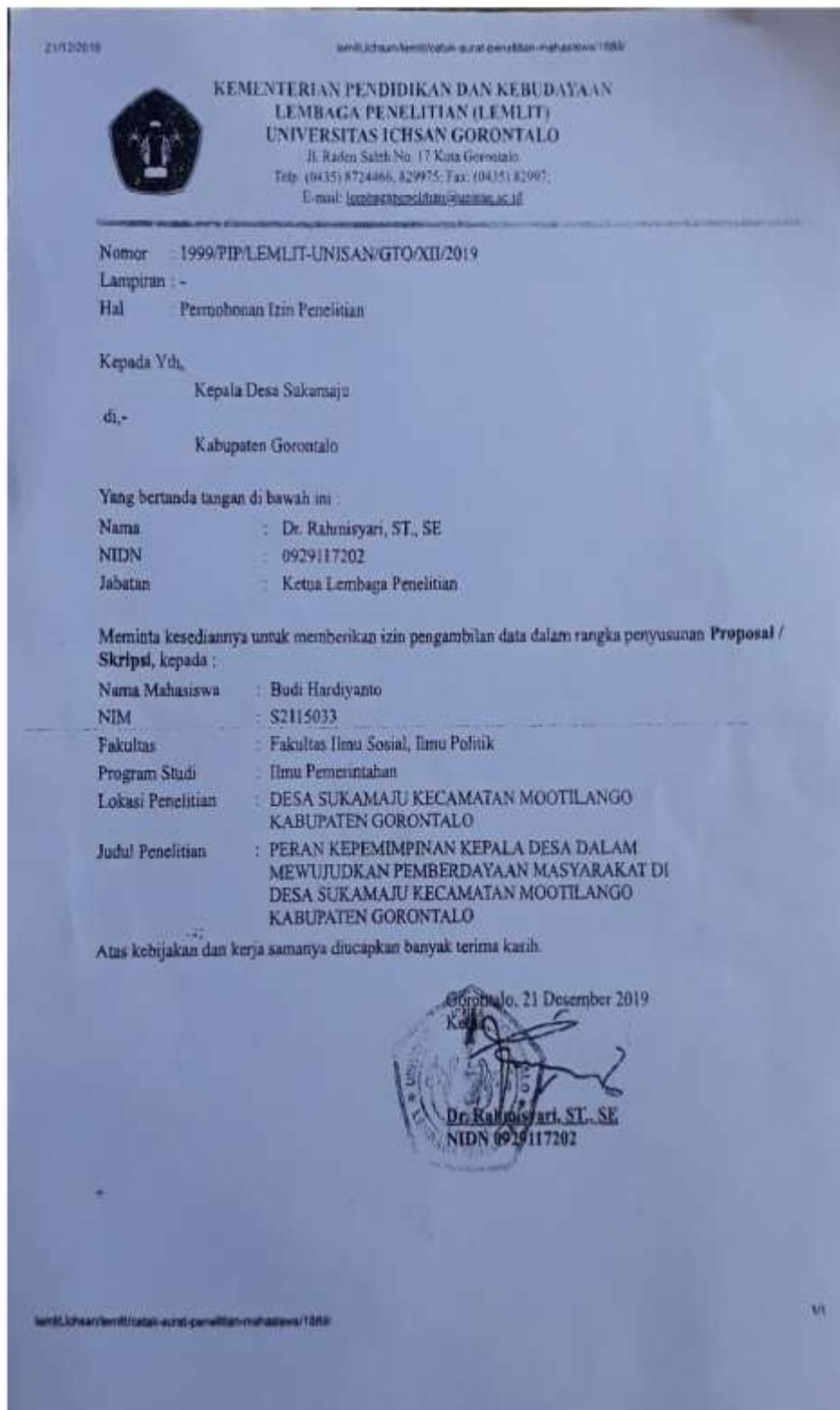
Kepala Desa, Bapak Halid M. Salehe



Aparat Desa, Bapak Wahab Kaida



Ketua BPD, Bapak Harson Manggopa

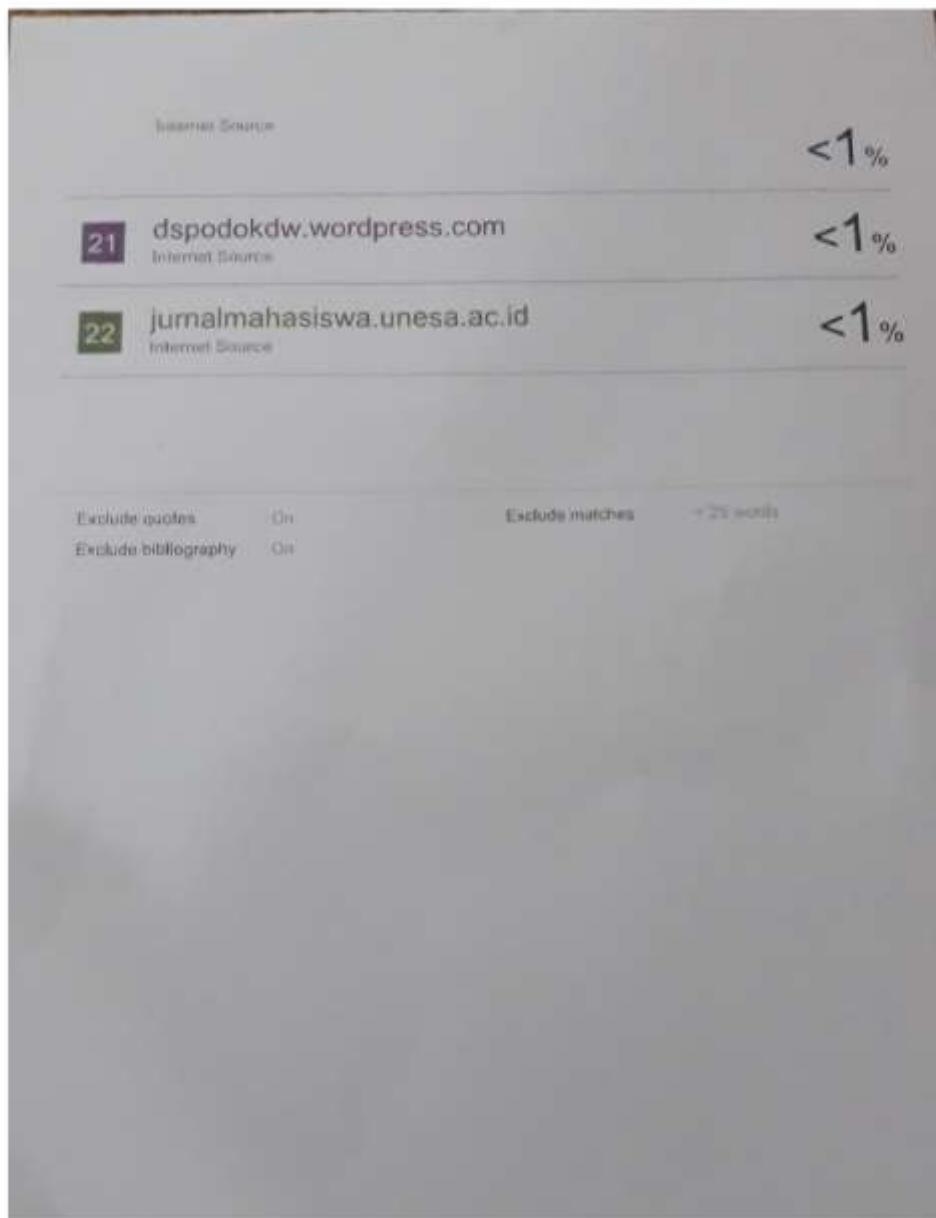








9	id.scribd.com Internet Source	<1 %
10	id.123dok.com Internet Source	<1 %
11	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
12	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
13	alhanisberbagilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
17	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
18	kectanjungraja.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
20	materipengetahuanumum.blogspot.com	



### **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Budi Hardiyanto  
 NIM : S2115033  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bitung, 12 Januari 1998  
 Nama Orang Tua



Ayah : Hartoyo  
 Ibu : Kartin Ahmad

Saudara  
 Kakak : Nur Indra Hardiyanti  
 Adik : -  
 Riwayat Pendidikan :

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENJANG</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>KET</b>
1.	2009	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bitung	Bitung	Berijazah
2.	2012	Madrasah Tsanawiyah Arafah Bitung	Bitung	Berijazah
3.	2015	SMA Terpadu Wirabhakti Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah